



**TINJAUAN YURIDIS UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2001
TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI TERHADAP PELAKSANAAN
KONTRAK BAGI HASIL**

TESIS

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum

SUGENG SUSILO

1220922094

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA

PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER ILMU HUKUM

2015

PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya sendiri, dan semua sumber yang dikutip maupun yang dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Sugeng Susilo

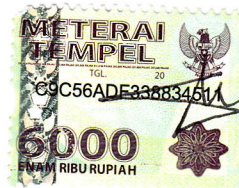
NPM : 122.0922.094

Tanggal : 2 Agustus 2015

Bilamana dikemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan saya ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jakarta, 2 Agustus 2015

Yang Menyatakan,



(Sugeng Susilo)

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Sugeng Susilo
NPM : 122.0922.094
Program : Pascasarjana
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta Hak Bebas Royalti Non eksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

TINJAUAN YURIDIS UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI TERHADAP PELAKSANAAN KONTRAK BAGI HASIL

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti ini Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan Tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta

Pada tanggal : 2 Agustus 2015

Yang menyatakan,



(Sugeng Susilo)



**PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL
"VETERAN" JAKARTA**

LEMBAR PERSETUJUAN

Disetujui untuk dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Program Pascasarjana
Magister Ilmu Hukum UPN "Veteran" Jakarta.

Jakarta, 27 Juli 2015

Pembimbing I

Prof. Dr. Jeane Neltje Saly, SH., MH., APU

Pembimbing II

DR. Arrisman, S.H., MH

Ketua Program

Dr. Enni Agustina, S.H., Sp.N

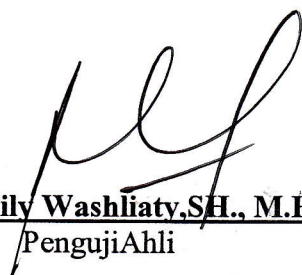
PENGESAHAN

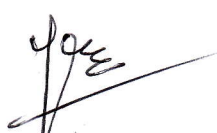
Tesis diajukan oleh :

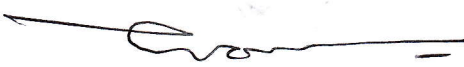
Nama : Sugeng Susilo
NPM : 122.0922.094
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Judul Tesis : Tinjauan Yuridis Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001
Tentang Minyak dan Gas Bumi Terhadap Pelaksanaan
Kontrak Bagi Hasil

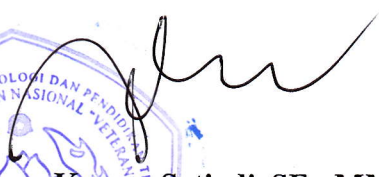
Telah berhasil dipertahankan di hadapan Tim Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.


Dr. Erni Agustina, SH., Sp.N
Ketua Penguji

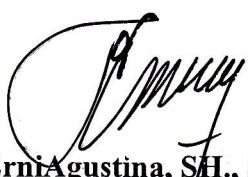

Dr. Dra. Laily Washliaty, SH., M.Hum
Penguji Ahli


Prof. Dr. Jeane Neltje Saly, SH., MH, APU
Penguji 1/Pembimbing


DR. Arrisman, S.H, MH
Penguji 2/Pembimbing



Dr. Iwan Kresna Setiadi, SE., MM
Direktur


Dr. Erni Agustina, SH., Sp.N
Ka. Prodi

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal Ujian : 2 Agustus 2015

TINJAUAN YURIDIS UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI TERHADAP PELAKSANAAN KONTRAK BAGI HASIL

Sugeng Susilo

Abstrak

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaturan pelaksanaan kontrak bagi hasil dan implementasi Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Indonesia merupakan salah satu negara dengan kandungan minyak dan gas bumi yang berlimpah namun belum dikelola dengan baik. Undang-undang nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagai landasan hukum pengelolaan minyak dan gas bumi sudah beberapa kali di Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi terkait dengan sistem kontrak yang bertentangan dengan konstitusi karena dengan sistem kontrak akan mendegradasikan penguasaan negara terhadap kekayaan alam sehingga sistem kontrak bagi hasil dalam pengelolaan minyak dan gas bumi harus dihapuskan atau diganti dengan sistem perizinan selain itu keberadaan badan pengelola minyak dan gas bumi juga bertentangan dengan konstitusi karena sesuai dengan pertimbangan Mahkamah Konstitusi. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah yuridis normatif yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pijakan normatif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa hubungan antara negara dengan swasta dalam pengelolaan sumber daya alam tidak dapat dilakukan dengan hubungan keperdataan akan tetapi harus merupakan hubungan yang bersifat publik yaitu berupa pemberian konsesi atau perizinan yang sepenuhnya di bawah kontrol dan kekuasaan negara. Kontrak keperdataan akan mendegradasi kedaulatan negara atas sumber daya alam. Berdasarkan hal tersebut, Mahkamah Konstitusi berpendapat hubungan antara negara dan sumber daya alam minyak dan gas sepanjang dikonstruksikan dalam bentuk kontrak kerjasama dan satuan kerja khusus minyak dan gas sebagai pihak Pemerintah atau mewakili Pemerintah dengan badan usaha atau bentuk usaha tetap adalah bertentangan dengan prinsip penguasaan negara yang dimaksud konstitusi.

Kata Kunci: Tinjauan yuridis, kontrak bagi hasil, minyak dan gas bumi.

JUDICIAL REVIEW LAW NO. 22 OF 2001 CONCERNING OIL AND GAS AGAINST IMPLEMENTATION OF PRODUCTION SHARING CONTRACT

Sugeng Susilo

Abstract

This study was conducted to determine the arrangements for the contract implementation and the results of the implementation of Law No. 22 of 2001 on Oil and Gas. Indonesia is one country with oil and gas are plentiful but not well managed. Law No. 22 of 2001 on Oil and Gas as a legal basis the management of oil and gas has several times in the Judicial Review to the Constitutional Court related to the contract system as opposed to the constitution because the contract system will degrade the state's control of the natural resources so that the system production sharing contracts in the management of oil and gas should be abolished or replaced by a licensing system governing body other than the existence of oil and gas is also against the constitution because according to the judgment of the Constitutional Court. The method used in this thesis is a normative juridical research that refers to the legal norms contained in the legislation applicable as normative footing. The conclusion from this study is that the relationship between the state and the private sector in the management of natural resources can not be done by civil relations but will have a relationship that is public in the form of concessions or licenses were completely under the control and power of the state. Civil contract will degrade state sovereignty over natural resources. Based on this, the Constitutional Court believes the relationship between the state and natural resources of oil and gas along constructed in the form of the contract and a special unit of oil and gas as the Government or a Government representing the business entities or permanent establishment is contrary to the principle of state control referred to the constitution.

Keywords: judicial review, production sharing contracts, oil and gas.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala karunia-Nya hingga tesis ini berhasil diselesaikan. Judul yang dipilih dalam penelitian ini yang dilaksanakan sejak April 2015 adalah “ **Tinjauan Yuridis Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Terhadap Pelaksanaan Kontrak Bagi Hasil**”. Terima kasih penulis ucapkan kepada Ibu Prof. Dr. Jeane Neltje Saly, SH., MH, APU selaku dosen pembimbing 1 dan Bapak Dr. Arrisman SH., MH selaku dosen pembimbing 2, yang telah banyak memberikan saran yang sangat bermanfaat.

Disamping itu, ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Ayah Kismin, Ibu Sulasih (Alm), serta seluruh keluarga yang tidak henti-hentinya memberikan penulis semangat dan doa. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada Ibu Dr. Erni Agustina, SH., Sp.N, selaku Kepala Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta yang telah memberikan dorongan kepada penulis untuk menyelesaikan tesis ini. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada teman-teman yang telah membantu dalam penulisan tesis ini.

Jakarta, 2 Agustus 2015

Penulis,

(Sugeng Susilo)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
PERNYATAANPERSETUJUAN PUBLIKASI.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
PENGESAHAN.....	v
REVISI HASIL SEMINAR SIDANG KOMPREHENSIF/TESIS.....	vi
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	x

BAB I PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang Masalah.....	1
I.2. Perumusan Masalah.....	8
I.3. Tujuan Penelitian.....	9
I.4. Manfaat Penelitian.....	9
I.5. Kerangka Teoritis.....	9
I.6. Kerangka Konseptual.....	15
I.7. Metode Penelitian.....	17
I.7. Sistematika Penulisan.....	18

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

II.1.Sejarah Peraturan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi diIndonesia	20
II.2.Kegiatan Hulu.....	29
II.3.Kegiatan Hilir.....	30
II.4 Kedudukan dan Wewenang Badan Hukum Pengelola Migas.....	32
II.5.Dominasi Pengolahan Minyak dan Gas Bumi oleh Perusahaan Asing...	35

BAB III METODE PENELITIAN

III.1. Metode Penelitian	41
III.2. Metode Analisis Data	43

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

IV.1. Pengaturan Pelaksanaan Kontrak Bagi Hasil Pertambangan Minyak dan Gas Bumi.....	44
---	----

IV.2.Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi	59
---	----

BAB V PENUTUP

V.1. Kesimpulan.....	83
V.2. Saran	88

DAFTAR PUSTAKA

RIWAYAT HIDUP